



**MODEL RASIO PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
WILAYAH ADAT HA ANIM**

Boy Piter Nizu Kekry

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cendrawasih, Indonesia

boypiters.kekri@feb.uncen.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Berbagai kendala pembangunan yang terjadi di Provinsi Papua selama ini, memberikan sebuah orientasi tersendiri dalam membangun skema kesejahteraan yang berbasis pada etnografi Papua.

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur nilai model rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah di wilayah adat Ha Anim tahun 2015-2019, mendeskripsikan orientasi ilmiah, dalam membangun daya saing Pendapatan Asli Daerah dalam ruang lingkup keuangan daerah.

Metode penelitian: Metode analisis ini terdapat dua rasio pertumbuhan yang diterapkan yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr).

Hasil penelitian: Hasil menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan pendapatan asli daerah hanya mampu mencapai 1,74%, potret ini sebagai wujud dari wajah kemandirian fiskal pada wilayah adat Ha Anim periode 2015-2019.

Kesimpulan: Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan pertumbuhan pendapatan asli daerah hanya mampu mencapai 1,74%, potret ini sebagai wujud dari wajah kemandirian fiskal pada wilayah adat Ha Anim periode 2015-2019. Tentunya pertumbuhan negatif pada komponen PAD Kabupaten Pemebaran Boven Digoel menjadi salah satu tantangan dimasa yang akan datang. Melalui hasil Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) wilayah adat Ha Anim, ternyata Kabupaten Boven Digoel memiliki pola tanda RPip [negatif] pada komponen retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Tentunya hal ini mengindikasikan penerimaan potensi kedua komponen PAD ini, belum optimal memberikan dampak kepada daya saing kemandirian fiskal dengan Kabupaten Merauke, sebagai Kabupaten Induk.

Kata kunci : **Ha Anim, Model Rasio Pertumbuhan, Pendapatan Asli Daerah**

Abstract

Background: Various development constraints that occurred in Papua Province so far, providing a separate orientation in building a welfare scheme based on Papuan ethnography.

Research objectives: This study aims to measure the value of the regional native income growth ratio model in the Ha Anim indigenous region in 2015-2019, describing scientific orientation, in building the competitiveness of Regional Native Income within the regional financial scope.

Research method: This analysis method contains two growth ratios applied, namely the Study Area Growth Ratio (RPs) and the Reference Area Growth Ratio (RPr).

Results: Results showed that the development of regional native income growth was only able to reach 1.74%, this portrait as a manifestation of the face of fiscal independence in the ha anim customary region for the period 2015-2019.

Conclusion: This study can be concluded that the development of regional revenue growth was only able to reach 1.74%, this portrait as a form of the face of fiscal independence in the ha anim indigenous region for the period 2015-2019. Of course, negative growth in the PAD component of Boven Digoel Expansion Regency becomes one of the challenges in the future. Through the results of the Calculation of Growth Ratio Model (MRP) of Ha Anim customary region, it turns out that Boven Digoel Regency has a pattern of RPip [negative] marks on regional levy components and other legitimate PAD. Of course, this indicates the acceptance of the potential of these two PAD components, has not optimally impacted the competitiveness of fiscal independence with Merauke Regency, as the Parent Regency.

Keywords : **Ha Anim, Growth Ratio Model, Regional Native Income**

Diterima: 26-9-2021; Direvisi: 7-10-2021; Disetujui: 14-10-2021

PENDAHULUAN

Keberadaan unsur entografi seringkali terlupakan dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah (Murdiastuti & Rohman, 2018), hal ini senapas dengan adanya pesta Otonomi Daerah saat ini menjadi momentum dalam memperkokoh kedalaman (Wijoyo, 2012) dan dinamika kultur budaya. Sepanjang dua periode masa kepemimpinan Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe dan Bapak, Klemen Tinal, terlihat strategi pembangunan kewilayahan didasarkan pola pembagian 5 wilayah adat, hal mendasar yang menjadi pertimbangan ialah hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik hingga geografis (Paskalis, 2020). Kebijakan Otonomi Daerah ini, memberikan ruang kebebasan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) (Hidayat, 2020), sejak tahun 1999-2009 mampu melahirkan 7 Provinsi, 164 Kabupaten, dan 34 Kota (Permendagri 21 Tahun 2010). Wilayah selatan Provinsi Papua yaitu Kabupaten Merauke, saat ini dikenal dengan wilayah adat “Ha Anim” memproses 3 daerah otonom baru yaitu: Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Hakekat pemekaran ini didasarkan pada unsur kesejahteraan rakyat, memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Negeri, 2011). Secara teori kewilayahan, terdapat suatu mimpi besar pembangunan ialah mengentaskan kesenjangan vertikal dan horizontal (Siagian, 2020).

Perjalanan wilayah adat “Ha Anim” hingga saat ini, masih diselimuti oleh tantangan-tantangan otonomi daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pemekaran daerah bahwa terindikasi daerah otonom baru tidak secara otomatis menjadi lebih baik dari sebelum dimekarkan (Negeri, 2011). Jika lahirnya Daerah Otonom Baru dalam kerangka mendekatkan pembangunan, maka sepatutnya perlu adanya penopang keuangan daerah yang seimbang. Kondisi faktual hingga saat ini, Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi memiliki proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan APBD masih sangat didominasi oleh transfer pendanaan dari pemerintah pusat. Fakta empiris lainnya, sampai tahun 2016 belum ada daerah di Indonesia yang mencapai proporsi PAD terhadap APBD sebesar 70 persen.

Landasan konseptual mengenai Pendapatan Asli Daerah, memandang semua pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang, 2004). Selain itu, PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah otonom yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anggraini, 2010). Keterkaitan dengan yang disampaikan dalam konsep ialah Pendapatan Asli Daerah sebagai cermin Pertumbuhan Ekonomi. Maka dapat dibangun sebuah asumsi, melalui sudut pandang pendapatan asli daerah merupakan *impact* dari pergerakan perekonomian wilayah ataupun dapat sebaliknya Pendapatan Asli Daerah merupakan *input* dalam perekonomian wilayah itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan Lokus pada wilayah adat Ha Anim terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi. Sedangkan fokus pada penelitian ini mengungkap isu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rentang tahun pengamatan 5 (lima) tahun 2015-2019. Secara garis besar penelitian ini pada prinsipnya menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mengungkap berbagai kecenderungan yang terjadi pada isu penelitian dan juga proses pengukuran fokus penelitian. Kebutuhan data dalam penelitian ini yakni data sekunder yang ber-sumber dari beberapa lembaga resmi antara lain (1) Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) RI dan (2) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Proses Pengumpulan Data melalui mekanisme studi kepustakaan pada beberapa dokumen antara lain (1) Target/Realisasi APBD Pokok/Perubahan Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Boven Digoel tahun 2015-2019 (2) Regulasi Keuangan Daerah dan Literatur Jurnal Penelitian yang berkaitan secara langsung terhadap isu penelitian ini. Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu proses adopsi metode MRP *competitive advantage* (Papua, 2016). Dimana penggunaan model dalam penelitian daya saing keuangan daerah di wilayah adat Ha Anim, MRP membandingkan pertumbuhan komponen pendapatan asli daerah pada suatu kabupaten yang lebih besar (Kabupaten Induk). Pada metode analisis ini terdapat dua rasio pertumbuhan yang diterapkan yaitu Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) dan Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr). Berikut metode analisis MRP pendapatan asli daerah di wilayah adat Ha Anim.

$$RP_{ip} = \frac{(y_{ipt} - y_{ip0}) / y_{ipt}}{(y_{pt} - y_{p0}) / y_{p0}} \dots\dots\dots(1)$$

$$RP_{in} = \frac{(y_{int} - y_{in0}) / y_{int}}{(y_{nt} - y_{n0}) / y_{n0}} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- RP_{ip} = Rasio Pertumbuhan wilayah analisis
- RP_{in} = Rasio Pertumbuhan wilayah referensi
- y_{ipt} = Komponen PAD wilayah analisis ke p pada periode tahun akhir
- y_{ip0} = Komponen PAD wilayah analisis ke p pada periode tahun awal
- y_{pt} = Total PAD wilayah analisis ke p pada periode tahun akhir
- y_{p0} = Total PAD wilayah analisis ke p pada periode tahun awal
- y_{int} = Komponen PAD wilayah referensi ke p pada periode tahun akhir
- y_{in0} = Komponen PAD wilayah referensi ke p pada periode tahun awal
- y_{nt} = Total PAD wilayah referensi ke p pada periode tahun akhir
- y_{n0} = Total PAD wilayah referensi ke p pada periode tahun awal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ciri khas sesuatu daerah otonom baru, ialah mampu menunjukkan eksistensi pelayanan publik dari kemampuan kemandirian keuangan daerah. Sepatutnya porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam pembiayaan pelayanan publik harusnya mendominasi porsi belanja daerah. Namun menjadi tantangan bersama hampir keseluruhan daerah otonom baru, ataupun kabupaten induk di Provinsi Papua. Menunjukkan kemandirian keuangan daerah secara rata-rata masih berkisar di bawah 10 persen. Tentunya dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukannya strategi pengelolaan pendapatan asli daerah pada daerah otonom baru, baik dari segi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Berikut disajikan beberapa potret secara makro perkembangan pertumbuhan komponen pendapatan asli daerah khususnya pada wilayah adat Ha Anim.

Tabel 1. Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Adat Ha Anim Tahun 2015-2019.

No	Kabupaten	Pajak (%)				Retribusi (%)			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Merauke	4,86	4,64	4,43	4,24	-2,67	4,45	-0,33	0,82
2	Boven Digoel	0,50	5,59	9,88	7,95	-3,68	-2,19	-3,35	-3,18
3	Mappi	-2,04	-4,39	1,55	8,91	6,71	-0,44	-2,11	6,78
4	Asmat	6,76	4,05	1,62	4,91	-0,85	3,08	2,09	8,79
	Rerata	2,52	2,47	4,37	6,50	-0,12	1,22	-0,93	3,30

Sumber Data: DJPK Kementerian Keuangan, 2015-2019 (Data diolah).

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu basis dalam postur Pendapatan Asli Daerah (Samuda, 2016). Jika diamati dari informasi pada tabel 1 di atas maka Kabupaten Merauke merupakan kabupaten induk yang memiliki rerata pertumbuhan 4,54 persen, sedangkan untuk Kabupaten Boven Digoel mampu menembus rerata tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen, untuk Kabupaten Mappi dan Asmat masing-masing dengan rerata pertumbuhan sebesar 4,34 persen dan 3,97 persen. Jika diamati untuk kinerja realisasi pajak daerah pada daerah otonom baru, sepanjang tahun 2015-2019 berkisar 3,78 persen. Angka ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (Adi, 2012), memang disadari kontribusi pajak daerah masih sangat dominan dibandingkan dengan komponen PAD lainnya. Secara makro terhadap beberapa hubungan yang mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu dari sisi pertumbuhan ekonomi daerah. Esensi dari konsep bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam kerangka mengelola potensi perekonomian daerah, dengan berkembangnya ekonomi daerah maka mampu mendorong tumbuhnya pendapatan daerah dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Deskriptif perkembangan retribusi daerah seperti yang disajikan pada tabel 1, Jika mengamati informasi pada tabel pertumbuhan retribusi di atas, tercermin kondisi yang berbeda dengan capaian pada pajak daerah. Dimana kabupaten induk yakni Merauke mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2016 sebesar -2,67 persen dan pada tahun 2018 mencapai -0,33 persen. Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata sebesar -3,10 persen. Sedangkan Kabupaten Mappi dan Asmat mampu menjaga pertumbuhan retribusi dengan rerata masing-masing 2,74 persen dan 3,28 persen, walaupun pada tahun 2017-2018 juga mengalami hal yang sama yaitu pertumbuhan retribusi daerah yang negatif. Perbedaan dari pengelolaan pajak daerah, dimana retribusi daerah lebih kepada inovasi dan kebijakan kepala daerah dan masing-masing organisasi pemerintah daerah.

Tabel 2. Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah Wilayah Adat Ha Anim Tahun 2015-2019.

No	Kabupaten	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (%)				Lain-lain PAD yang sah (%)			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Merauke	9,14	0,78	-2,83	9,11	2,23	1,82	1,65	-0,84
2	Boven Digoel	8,54	9,37	5,50	7,24	-1,72	-1,03	-1,52	4,15
3	Mappi	-2,09	2,16	4,65	0,67	0,19	-0,23	0,05	7,33
4	Asmat	1,34	-2,15	-2,40	9,46	4,05	3,21	1,48	3,39
	Rerata	4,23	2,54	1,23	6,62	1,19	0,94	0,42	3,51

Sumber Data: DJPK Kementerian Keuangan, 2015-2019 (Data diolah).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan ialah pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah seperti yang telah di potret pada tabel 2 di atas. Seyogyanya dengan adanya pemekaran daerah ataupun daerah otonom baru, telah mampu memetakan potensi daerah, yang mana akan dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah. Sepanjang tahun 2015-2019 terlihat perkembangan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Kabupaten Merauke sebagai kabupaten induk dengan rerata sebesar 4,05 persen namun untuk pertumbuhan lain-lain PAD yang sah hanya 1,21 persen, sedangkan untuk kabupaten pemekaran mappi hanya mampu tumbuh dengan rata-rata 1,35 persen begitupun capaian pertumbuhan pada lain-lain PAD yang sah hanya berkisar 1,84 persen, sedangkan untuk Kabupaten Asmat pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1,56 persen, namun untuk lain-lain PAD yang sah cukup tinggi mencapai 3,03 persen. Namun untuk Kabupaten Boven Digoel dapat dikatakan unggul, dimana mampu menciptakan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,66 persen, namun kondisi yang berbeda capaian pada lain-lain pendapatan yang sah, dimana mengalami pertumbuhan negatif dengan rerata mencapai -0,03 persen.

Tabel 3. Nilai Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Pendapatan Asli Daerah Wilayah Adat Ha Anim Periode Tahun 2015-2019.

PAD	Merauke (RPin)		Boven Digoel (RPip)		Mappi (RPip)		Asmat (RPip)	
	Nilai	Tanda	Nilai	Tanda	Nilai	Tanda	Nilai	Tanda
Pajak	2.6624	+	7.4712	+	0.5368	+	1.4341	+
Retribusi	0.3448	+	-4.8824	-	1.5446	+	1.0965	+
Kekayaan Daerah	2.3297	+	9.2824	+	0.7932	+	0.5166	+
Lain-Lain	0.7663	+	-0.0856	-	1.0615	+	1.0360	+

Sumber Data: DJPK Kementerian Keuangan, 2015-2019 (Data diolah).

Melalui ulasan mengenai pertumbuhan komponen PAD di wilayah adat Ha Anim, ternyata peran pajak daerah masih menjadi penopang unggulan pada postur PAD kewilayahan. Apabila menyikapi peranan PAD, langkah kongkrit yang penting ialah perlu adanya inovasi dalam menciptakan daya saing pengelolaan pendapatan daerah. Pada tabel 3 di atas menunjukkan hasil perhitungan model rasio pertumbuhan, dimana melalui informasi ini menjadi sandaran awal, bagi proses perencanaan pendapatan daerah pada wilayah adat Ha Anim. Melalui tabel 3 terlihat secara jelas dimana untuk kabupaten merauke sebagai daerah referensi/kabupaten induk memiliki arah tanda yang [positif] untuk keseluruhan komponen, hal serupa untuk kabupaten analisis/kabupaten pemekaran yang bertanda (positif). Sedangkan untuk Kabupaten Boven Digoel, ternyata terdapat arah tanda yang (negatif) pada komponen retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 4. Kriteria Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Pendapatan Asli Daerah Wilayah Adat Ha Anim Periode Tahun 2015-2019.

PAD	Boven Digoel			Mappi			Asmat		
	RPin	RPip	Kriteria	RPin	RPip	Kriteria	RPin	RPip	Kriteria
Pajak	+	+	Potensi: BD dan MRK	+	+	Potensi: MPP dan MRK	+	+	Potensi: AST dan MRK
Retribusi	+	-	Potensi: MRK	+	+	Potensi: MPP dan	+	+	Potensi: AST dan

PAD	Boven Digoel			Mappi			Asmat		
	RPin	RPip	Kriteria	RPin	RPip	Kriteria	RPin	RPip	Kriteria
Kekayaan Daerah	+	+	Potensi: BD dan MRK	+	+	Potensi: MPP dan MRK	+	+	Potensi: AST dan MRK
Lain-Lain	+	-	Potensi: MRK	+	+	Potensi: MPP dan MRK	+	+	Potensi: AST dan MRK

Sumber Data: DJPK Kementerian Keuangan, 2015-2019 (Data diolah).

Keterangan:

BD = Boven Digoel, MRK = Merauke, MPP = Mappi, AST= Asmat

Melalui tabel 4 di atas ini, telah dinformasikan kriteria model rasio pertumbuhan PAD pada wilayah adat Ha Anim sepanjang periode anggaran 2015-2019. Kabupaten Pemekaran Boven Digoel, kriteria RPIn dan RPip komponen Pajak dan Kekayaan Daerah memiliki pola tanda [positif], dimana hal ini menandakan penerimaan kedua komponen PAD tersebut, merupakan potensi baik di Kabupaten Boven Digoel maupun Merauke. Sedangkan untuk kriteria, RPIn dan RPip komponen retribusi dan lain-lain PAD memiliki pola tanda [negatif] untuk kriteria RPip. Kondisi ini memiliki makna bahwa komponen tersebut tidak potensi pada Kabupaten Boven Digoel. Kriteria model rasio pertumbuhan Kabupaten Mappi dan Asmat seragam pada periode anggaran 2015-2019, untuk komponen Pajak, Retribusi, Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD, memiliki kriteria RPIn dan RPip dengan pola tanda (positif). Hal ini tentunya mencerminkan keseluruhan komponen PAD tersebut merupakan potensi pada Kabupaten Mappi dan Asmat. Melalui ulasan analisis di atas, maka terdapat tantangan dalam membangun pertumbuhan yang konsisten pada komponen retribusi dan lain-lain. Kondisi Kabupaten Boven Digoel ini, tentunya belum sejalan dengan esensi desentralisasi fiskal yang diharapkan. Kondisi tantangan potensi retribusi terjadi pada hasil penelitian (Dadang dan Hani, 2021) bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah namun dengan arah yang negatif, selain itu juga hasil penelitian dari (Orocomna et al., 2017), bahwa retribusi tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Selanjutnya hal serupa pada penelitian (Ningsih & Novianty, 2020) menyebutkan bahwa rata-rata kontribusi retribusi daerah dan lain-lain PAD Provinsi Sumatera Selatan lebih rendah dari rata-rata kontribusi retribusi nasional dengan berbagai kondisi pada daerah otonom di berbagai daerah lainnya, maka dalam tatanan konsep daya saing ini, maka perlu adanya penguatan inovasi secara simultan dan berkelanjutan dalam pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD di wilayah adat Ha Anim. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya. Konsep ini didukung dengan hasil empiris dari (Yasin, 2020) bahwa hubungan linieritas positif antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi, dan juga perlu adanya pengelolaan belanja daerah yang mendukung dimana hasil penelitian yang sama menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara belanja pembangunan/modal dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tantangan lainnya dari Kabupaten Mappi dan Asmat, dimana dengan hasil model MRP yang menunjukkan adanya potensi pada semua komponen PAD. Namun capaian tersebut belum mampu mewujudkan kemandirian keuangan daerah pada daerah otonom tersebut. Sehingga dapat dikatakan, potensi pendapatan asli daerah selama

periode anggaran 2015-2019 ini belum mampu membiayai kebutuhan fiskal Kabupaten Mappi dan Asmat. Kondisi wilayah adat Ha Anim berdasarkan derajat kemandirian fiskal Propinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu penelitian (2001-2006), proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) diperoleh hasil rata-rata sebesar 24,18 persen. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil temuan empiris dan didukung dengan temuan fakta ilmiah melalui model MRP, serta mempertimbangkan kerangka konseptual. Maka dapat ditarik kesimpulan umum hasil penelitian ini bahwa perkembangan pertumbuhan pendapatan asli daerah hanya mampu mencapai 1,74 persen, potret ini sebagai wujud dari wajah kemandirian fiskal pada wilayah adat ha anim periode 2015-2019. Tentunya pertumbuhan negatif pada komponen PAD kabupaten pemekaran Boven Digoel menjadi salah satu tantangan dimasa yang akan datang. Melalui hasil perhitungan model rasio pertumbuhan (MRP) wilayah adat Ha Anim, ternyata Kabupaten Boven Digoel memiliki pola tanda RPip [negatif] pada komponen retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Tentunya hal ini mengindikasikan penerimaan potensi kedua komponen PAD ini, belum optimal memberikan dampak kepada daya saing kemandirian fiskal dengan Kabupaten Merauke, sebagai kabupaten induk. Walaupun melalui kriteria model rasio pertumbuhan (MRP) wilayah adat Ha Anim, untuk potensi komponen PAD yakni pajak, retribusi, kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah bagi Kabupaten Mappi dan Asmat. Dimana memiliki pola tanda RPip [positif], tentunya hal ini dapat menguatkan opini bahwa telah terbentuk daya saing pertumbuhan PAD dengan kabupaten induk Merauke. Namun capaian kriteria MRP tersebut, ternyata belum memberikan dampak substantif kepada esensi dari desentralisasi fiskal periode anggaran 2015-2019.

BIBLIOGRAFI

- Adi, P. H. (2012). Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi dan relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi. *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 21(1), 1–19.
- Angraini, D. (2010). *Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); studi empiris pada Propinsi Bengkulu*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2010.
- Dadang dan Hani. (2021). Analisis Retribusi dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Hidayat, A. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Tahkim*, 3(1), 125–134.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004).
- Murdiastuti, A., & Rohman, H. (2018). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance*.
- Negeri, K. D. (2011). *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang*

- Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada Sekretariat Kementerian Dalam Negeri
- Ningsih, E. K., & Novianty, D. E. (2020). Analisis Potensi PAD Provinsi Sumatera Selatan. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 157–165.
- Orocomna, M., Bharanti, B. E., & Allo Layuk, P. K. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(3), 217593.
- Papua, B. P. S. P. (2016). *Sensus Ekonomi Hasil Listing*. Potensi Ekonomi Provinsi Papua.
- Paskalis. (2020). Menggugat Tujuh Wilayah Adat di Tanah Papua. *Suara Papua*.
- Samuda, S. (2016). Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate dari Sektor Pajak Daerah dalam Menutupi Defisit Fiskal (Tahun Anggaran 2012-2014). *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(1).
- Siagian, D. L. (2020). *Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Wijoyo, S. (2012). *Kusebut Indonesia: Dari Keanekaragaman Menuju Keseragaman Hayati*. Airlangga University Press.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465–472.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License